

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2024

Luh Putu Dewi Andriani^{1*}, Ni Wayan Rustiarini², Yenny Verawati³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
*Email: andriluhtu1708@gmail.com

ABSTRACT

Carbon Emission Disclosure is a process of reporting information on the amount of carbon emissions or greenhouse gases (GHG) produced by a company, both directly and indirectly, as well as efforts that can be made to reduce the environmental impact caused by the company. The purpose of this study is to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership, government ownership, and environmental performance on carbon emission disclosure in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2022-2024. Sampling in this study used purposive sampling, resulting in a sample of 62 companies over a 3-year research period. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that institutional ownership and environmental performance have a positive effect on carbon emission disclosure, while managerial ownership, foreign ownership, and government ownership have no effect on carbon emission disclosure. Further research is recommended to add other variables such as environmental reputation and company size.

Keywords: Carbon Emission Disclosure, Environmental Performance, Foreign Ownership, Government Ownership, Institutional Ownership, Managerial Ownership.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan lingkungan paling serius pada abad ke-21 karena berdampak luas tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pemanasan global sebagai penyebab utama perubahan iklim dipicu oleh peningkatan suhu rata-rata bumi akibat akumulasi gas rumah kaca seperti CO₂, CH₄, dan N₂O. Berdasarkan laporan *World Meteorological Organization* Tahun 2025 menunjukkan bahwa konsentrasi CO₂ global terus meningkat hingga mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023, disertai kenaikan suhu sebesar 1,55°C dibandingkan era pra-industri. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya global dalam mengendalikan emisi karbon. Emisi karbon terutama berasal dari aktivitas industri, transportasi, dan sektor energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengelolaan emisi karbon menjadi fokus utama strategi keberlanjutan global. Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mitigasi perubahan iklim adalah melalui pengungkapan emisi karbon, yaitu pelaporan emisi gas rumah kaca baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengungkapan ini penting untuk meningkatkan transparansi, mengidentifikasi risiko lingkungan, serta memperkuat reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia turut menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan emisi karbon melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan menandatangani Protokol Kyoto yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Selain itu, Indonesia juga menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional hingga tahun

2030 (Mufarrihah, n.d.). Dalam konteks ini, peran sektor bisnis sangat penting, terutama melalui pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Fenomena meningkatnya tekanan publik terhadap perusahaan tercermin dalam kasus gugatan warga Pulau Pari terhadap PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (sebelumnya Holcim). Warga menilai aktivitas perusahaan berkontribusi besar terhadap emisi karbon yang memicu pemanasan global dan berdampak langsung berupa banjir besar. Gugatan tersebut menuntut ganti rugi serta penurunan emisi secara signifikan. Kasus ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim dan menegaskan bahwa tanggung jawab lingkungan tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga perusahaan (Bhawono, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon semakin besar, sehingga penting untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut, salah satunya adalah kepemilikan institusional. Investor institusional cenderung menuntut transparansi yang tinggi dalam pelaporan lingkungan. Namun, hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budanti et al. (2024) dan Angelina & Handoko (2023), memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghachem et al. (2022) dan Rizqullah (2024), memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Warnida (2023) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor berikutnya adalah kepemilikan manajerial, yang mencerminkan keterlibatan langsung manajemen dalam kepemilikan saham. Kepemilikan ini diyakini mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja dan transparansi. Namun, hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah et al. (2025) dan Sukmawati & Henny (2024) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Izzania et al. (2024) dan Lina & Rohmah (2024) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Aryati (2024) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor selanjutnya yang menjadi pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon adalah kepemilikan asing. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (2007) menjelaskan bahwa kepemilikan asing adalah penanaman modal yang dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing di wilayah Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih memperhatikan reputasi perusahaan di pasar internasional dikarenakan investor asing sering kali mempertimbangkan kinerja lingkungan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Namun, hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2021) dan Oyerogba et al. (2025) memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghachem et al. (2022) dan Cahyaningsih & Rahmadiyah (2024) memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzania et al. (2024) memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon pada suatu perusahaan adalah kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah ditunjukkan oleh jumlah saham perusahaan yang dimiliki pemerintah dari keseluruhan saham yang beredar (Winarni & Suryono, 2019). Pemerintah cenderung menginginkan perusahaan untuk lebih terbuka dan

akuntabel dalam pelaporan kinerja lingkungannya, termasuk emisi karbon. Namun, hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2024) dan Oyerogba et al. (2025) memperoleh hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghachem et al. (2022) memperoleh hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiany et al. (2022) dan Pistrikayanti & Wiawati (2024) memperoleh hasil bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Selain faktor struktur kepemilikan, faktor lainnya yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan proses mengevaluasi bagaimana suatu kegiatan, proses, atau organisasi mempengaruhi lingkungan. Kinerja lingkungan yang baik dapat mendorong transparansi perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon yang merupakan upaya perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulidiavitasari & Yanthi (2021) dan Armono et al. (2024) memperoleh hasil bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Angelina & Handoko (2023) memperoleh hasil bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Almuaromah & Wahyono (2022) dan Lasmia et al. (2024), yaitu memperoleh hasil bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan latar belakang yang memuat fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022–2024.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 yang menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup seluruh pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan (Freeman, 1984). Teori Pemangku Kepentingan juga dapat menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus dalam memaksimalkan keuntungan sebagai tanggungjawab perusahaan kepada pemangku kepentingan, melainkan juga memiliki tanggungjawab dalam memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan sosial dan pemangku kepentingan lainnya (Gunawan & Lindrawati, 2024). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya, salah satunya melalui transparansi dan pengungkapan informasi terkait dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan (Rahmania, 2025). Dalam konteks lingkungan, pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk nyata implementasi teori pemangku kepentingan, karena informasi tersebut penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Teori ini juga relevan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai bentuk kepemilikan perusahaan, seperti kepemilikan institusional, manajerial, asing, dan pemerintah, serta kinerja lingkungan. Setiap jenis kepemilikan mencerminkan kepentingan *stakeholder* yang berbeda dan dapat memengaruhi prioritas serta kebijakan perusahaan, khususnya dalam komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, *stakeholder theory* mampu menjelaskan bagaimana tekanan dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan

mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (Saputra, 2025).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, merupakan stakeholder yang memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan perusahaan (Aliyah et al., 2025). Semakin besar porsi kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tekanan yang diberikan kepada perusahaan untuk meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengungkapan emisi karbon (Angelina & Handoko, 2023). Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, investor institusional memiliki kekuatan untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi lingkungan, sehingga praktik pengungkapan emisi karbon mencerminkan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat (Rizqullah, 2024). Penelitian yang mendukung adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian yang dilakukan oleh Almuaromah & Wahyono (2022), Angelina & Handoko (2023), dan Budanti et al. (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk komisaris dan direktur yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan (Astini et al., 2022). Kepemilikan saham oleh manajemen mendorong keselarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena manajer turut merasakan dampak dari setiap keputusan yang diambil, sehingga lebih termotivasi menjaga reputasi, citra perusahaan, serta keberlanjutan bisnis jangka panjang (Wandi, 2022). Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, manajer yang memiliki saham bertindak sebagai *stakeholder* internal yang terdorong untuk menyelaraskan kebijakan operasional dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui transparansi pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Penelitian yang mendukung adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Henny (2024), Oyerogba et al. (2025), dan Diah et al. (2025) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan asing mengacu kepada kepemilikan saham oleh investor luar negeri atau investor asing (Fatine & Amanah, 2024). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, investor asing termasuk ke dalam kelompok pemangku kepentingan global yang memiliki peran dalam memberikan tekanan terhadap kebijakan perusahaan terkait transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan global (Gunawan & Aryati, 2024). Perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang tinggi cenderung lebih cepat menanggapi tuntutan pasar internasional, khususnya dalam pengungkapan emisi karbon, karena investor asing umumnya mewajibkan penerapan standar global yang ketat dalam transparansi informasi lingkungan. Penelitian yang mendukung adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2021), Rizqullah (2024), dan Oyerogba et al. (2025) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan

emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan pemerintah ditunjukkan oleh jumlah saham perusahaan yang dimiliki pemerintah dari keseluruhan saham yang beredar (Eryandi et al., 2021), umumnya melalui entitas seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepemilikan ini menempatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang peduli terhadap lingkungan dan transparan (Saputra, 2025). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, pemerintah tidak hanya mengharapkan perusahaan berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap tata kelola, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, sehingga semakin tinggi kepemilikan pemerintah, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang mendukung adanya pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2024), dan Oyerogba et al. (2025) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kinerja lingkungan menggambarkan seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan, termasuk upaya untuk mengurangi emisi karbon (Sekarini & Setiadi, 2021). Kinerja lingkungan memiliki kaitan dengan teori pemangku kepentingan, di mana perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung lebih aktif mengungkapkan informasi emisi karbon untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, membangun kepercayaan *stakeholder*, serta menjaga reputasi perusahaan (Dani & Harto, 2022). Penelitian yang mendukung adanya pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulidiavitasari & Yanthi (2021), Gunawan & Aryati (2024), Sukmawati & Henny (2024), Armono et al. (2024), dan Diah et al. (2025) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₅ : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024 yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022-2024. Teknik penentuan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, yaitu sebanyak 62 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$CED = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KM + \beta_3 KA + \beta_4 KP + \beta_5 KL + e \dots\dots\dots (1)$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja suatu perusahaan (Putri et al., 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung atau mengukur variabel kepemilikan institusional, yaitu sebagai berikut (Putri et al., 2022):

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang meliputi komisaris dan direktur perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Astini et al., 2022). Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan kode 1 jika perusahaan memiliki kepemilikan manajerial dan diberikan kode 0 jika perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan manajerial (Astini et al., 2022).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah penanaman modal oleh pihak asing yang menginvestasikan modal yang mereka miliki pada suatu perusahaan domestik (Fatine & Amanah, 2024). Rumus yang digunakan untuk menghitung atau mengukur variabel kepemilikan asing, yaitu sebagai berikut (Fatine & Amanah, 2024):

$$KA = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah ditunjukkan oleh jumlah saham perusahaan yang dimiliki pemerintah dari keseluruhan saham yang beredar (Eryandi et al., 2021). Dalam penelitian ini kepemilikan pemerintah diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan kode 1 jika perusahaan memiliki kepemilikan pemerintah dan diberikan kode 0 jika perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan pemerintah (Eryandi et al., 2021).

Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021). Dalam penelitian ini kinerja lingkungan diukur menggunakan PROPER, yaitu dengan lima (5) peringkat warna dengan kriteria dan skor yang berbeda-beda sesuai peringkat yang diperoleh dan akan diukur menggunakan skala ordinal, yaitu sebagai berikut (Sukmawati & Henny, 2024):

Tabel 1.
Peringkat dan Kriteria PROPER

Skor	Peringkat Warna	Kriteria
5	Emas	Sangat Baik Sekali
4	Hijau	Sangat Baik
3	Biru	Baik
2	Merah	Buruk
2	Hitam	Sangat Buruk

Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*)

Choi et al. (2013) menyatakan bahwa Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*) merupakan proses pelaporan informasi mengenai besarnya emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

serta upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pengukuran indeks pengungkapan emisi karbon dilakukan dengan sistem penilaian biner, yaitu setiap item diberi skor 1 apabila diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, dan skor 0 apabila tidak diungkapkan. Skor tertinggi adalah 18 jika seluruh item diungkapkan, dan skor terendah adalah 0 jika tidak ada item yang diungkapkan, sehingga pengungkapan emisi karbon dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Choi et al., 2013):

$$CED = \frac{\sum di}{M} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

CED = *Carbon Emission Disclosure*

$\sum di$ = Seluruh skor yang diungkapkan perusahaan

M = Seluruh skor yang seharusnya diungkapkan perusahaan (18 item)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	186	.002	1.046	.79261	.242229
Kepemilikan Manajerial	186	.000	1.000	.60215	.490775
Kepemilikan Asing	186	.001	.998	.30239	.282229
Kepemilikan Pemerintah	186	.000	1.000	.16667	.373684
Kinerja Lingkungan	186	2.000	5.000	3.36559	.795731
Pengungkapan Emisi Karbon	186	.110	.720	.19183	.058521
Valid N (listwise)	186				

Sumber: Data Diolah (2026)

Analisis Statistik Deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan data dilihat melalui penghitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.100	.018		5.534	<.001
Kepemilikan Institusional	.035	.017	.149	2.107	.037
Kepemilikan Manajerial	-.010	.008	-.087	-1.353	.178
Kepemilikan Asing	-.012	.014	-.059	-.874	.383

Kepemilikan Pemerintah	.001	.010	.009	.134	.894
Kinerja Lingkungan	.038	.005	.546	7.776	<.001

a. Dependent Variable: CED

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3, dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{CED} = 0,100 + 0,035 \text{ KI} - 0,010 \text{ KM} - 0,012 \text{ KA} + 0,001 \text{ KP} + 0,038 \text{ KL}.$$

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) adalah 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Pada pengujian autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,965. Nilai *dU* dalam penelitian ini yaitu dengan 5 variabel independen ($k=5$) dengan $n=186$ adalah 1,8155, sedangkan nilai $4-dU$ adalah $4 - 1,8155$ adalah 2,1845. Hal ini berarti nilai *Durbin-Watson* berada diantara *dU* dan $4-dU$ ($1,8155 < 1,965 < 2,1845$) yang menandakan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model penelitian ini serta model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya mengacu pada hasil uji multikolinearitas, masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan. Mengacu pada hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menandakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,280. Nilai tersebut menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan kinerja lingkungan mampu menjelaskan 28% variasi pada variabel pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure/CED*). Sisanya yaitu 72% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah $<0,001$ dimana angka ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan kinerja lingkungan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure/CED*).

Uji t

1. Berdasarkan hasil uji t, nilai statistik t untuk KI (kepemilikan institusional) adalah 2,107 dengan nilai signifikansi nya 0,037 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional bernilai positif, yaitu sebesar 0,035. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_1 diterima.
2. Berdasarkan hasil uji t, nilai statistik t untuk KM (kepemilikan manajerial) adalah -1,353 dengan nilai signifikansi nya 0,178 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih

- besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_2 ditolak.
3. Berdasarkan hasil uji t, nilai statistik t untuk KA (kepemilikan asing) adalah -0,874 dengan nilai signifikansi nya 0,383 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_3 ditolak.
 4. Berdasarkan hasil uji t, nilai statistik t untuk KP (kepemilikan pemerintah) adalah 0,134 dengan nilai signifikansi nya 0,894 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_4 ditolak.
 5. Berdasarkan hasil uji t, nilai statistik t untuk KL (kinerja lingkungan) adalah 7,776 dengan nilai signifikansi nya <0,001 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi untuk variabel kinerja lingkungan bernilai positif, yaitu sebesar 0,038. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_5 diterima.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional atau investor institusional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun merupakan *stakeholder* yang memiliki peranan penting dalam memengaruhi arah kebijakan suatu perusahaan (Aliyah et al., 2025). Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti, ketika institusi memegang saham di suatu perusahaan dengan proporsi yang besar, maka institusi akan memberikan suatu tekanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan, yaitu termasuk laporan emisi karbon (Angelina & Handoko, 2023). Dalam perspektif teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para pemangku kepentingan yang terkait, sehingga adanya hubungan tersebut mendorong perusahaan untuk membuka informasi mengenai kegiatan operasionalnya secara lebih transparan (Angelina & Handoko, 2023). Investor institusional memiliki kekuatan untuk mendorong transparansi, termasuk pengungkapan emisi karbon, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Rizqullah, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung terdorong untuk meningkatkan kualitas dan keluasan pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almuaromah & Wahyono (2022), Angelina & Handoko (2023), dan Budanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022), Putri & Warnida (2023), Izzania et al. (2024), dan Zahra & Astuti (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajemen perusahaan juga bertindak sebagai pemegang saham (Astini et al., 2022). Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H_2 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini, besar kecilnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen tidak memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon. Tingginya kepemilikan saham oleh

manajemen tidak secara langsung mendorong pengungkapan emisi karbon apabila informasi tersebut dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan (Zahra & Astuti, 2025). Sebagai pemegang saham, manajemen umumnya lebih fokus pada upaya peningkatan laba, dividen, dan nilai saham dalam jangka pendek, sehingga pengungkapan emisi karbon yang bersifat sukarela dan memerlukan komitmen serta sumber daya tambahan belum menjadi prioritas utama. Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak mendorong peningkatan respon perusahaan terhadap tuntutan terkait isu lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almuaromah & Wahyono (2022), Putri & Warnida (2023), Gunawan & Aryati (2024), Zahra & Astuti (2025), dan Rizqullah (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Henny (2024), Oyerogba et al. (2025), dan Diah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan asing menggambarkan porsi atau persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri atau yang dapat disebut juga dengan investor asing (Fatine & Amanah, 2024). Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H₃ ditolak. Secara umum, investor asing sering dikaitkan dengan tuntutan transparansi dan penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Meskipun investor asing berasal dari negara yang lebih peduli terhadap isu lingkungan dan telah menerapkan pengungkapan emisi karbon, hal tersebut tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon yang bersifat sukarela. Berdasarkan sisi teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), perusahaan dipandang sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, lingkungan sosial dan pemangku kepentingan lainnya (Gunawan & Lindrawati, 2024). Tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap pengungkapan emisi karbon menunjukkan bahwa kebijakan pengungkapan lingkungan perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan berkelanjutan (Pramuditya & Budiasih, 2020). Dalam kondisi tersebut, keberadaan investor asing tidak cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan pengungkapan emisi karbon, karena keputusan tersebut lebih ditentukan oleh kebijakan internal perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramuditya & Budiasih (2020) dan Setiany et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2021), Rizqullah (2024), dan Oyerogba et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan pemerintah ditunjukkan oleh jumlah saham perusahaan yang dimiliki pemerintah dari keseluruhan saham yang beredar (Eryandi et al., 2021). Hipotesis keempat menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H₄ ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan pemerintah pada perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon.

Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai *stakeholder* memiliki kepentingan yang beragam, seperti menjaga stabilitas ekonomi, kinerja keuangan perusahaan, serta keberlangsungan operasional, sehingga isu pengungkapan emisi karbon belum menjadi prioritas utama (Widarjo et al., 2024). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan cenderung merespons tuntutan *stakeholder* yang memiliki kekuatan dan tekanan paling besar terhadap keberlangsungan perusahaan (Alviona & Saraswati, 2025). Tekanan yang diberikan pemerintah terkait pengungkapan emisi karbon masih relatif lemah, terutama karena pengungkapan emisi karbon bersifat sukarela dan belum diatur secara ketat (Setiany et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiany et al. (2022) dan Caroline et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2024), dan Oyerogba et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021). Hipotesis kelima menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga H₅ diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih baik cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memperoleh peringkat PROPER yang lebih tinggi memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap praktik keberlanjutan dan transparansi lingkungan. Perusahaan tersebut tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berupaya menunjukkan kepada publik bahwa aktivitas operasionalnya telah memperhatikan aspek lingkungan, termasuk pengelolaan emisi karbon (Sukmawati & Henny, 2024). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan dituntut untuk memenuhi harapan dan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan komunitas lingkungan. Perusahaan yang memiliki peringkat PROPER tinggi umumnya memandang pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari strategi komunikasi dan keberlanjutan perusahaan. Pengungkapan tersebut digunakan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan serta membedakan diri dari perusahaan lain yang memiliki kinerja lingkungan yang lebih rendah. Dengan demikian, pengungkapan emisi karbon tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat citra positif perusahaan di hadapan *stakeholder* (Diah et al., 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidiavitasari & Yanthi (2021), Gunawan & Aryati (2024), Sukmawati & Henny (2024), Armono et al. (2024), dan Diah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selviana & Ratmono (2019), (Almuaromah & Wahyono, 2022), Putri et al. (2022), dan Lasmiati et al. (2024) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*,

dimana menghasilkan 62 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan total 186 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, oleh karena itu diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) *Adjusted R Square* sebesar 0,280 atau 28%. Nilai tersebut memiliki arti atau menandakan bahwa variabel pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*/CED) mampu dijelaskan sebesar 28% oleh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kinerja lingkungan, sedangkan sisanya yaitu 72% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Keterbatasan selanjutnya, yaitu pada variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur menggunakan PROPER. Namun, tidak semua perusahaan dalam populasi penelitian mengikuti atau mempublikasikan peringkat PROPER secara konsisten pada setiap tahun pengamatan. Oleh sebab itu, menyebabkan jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel menjadi terbatas. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *environmental reputation* dan ukuran perusahaan, karena perusahaan dengan reputasi lingkungan yang baik serta skala usaha yang lebih besar cenderung menghadapi tingkat perhatian publik yang lebih tinggi sehingga lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan emisi karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Anshari, R., & Kusumawati, Y. T. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja Perusahaan di Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(3), 1–13.
- Almuaromah, D. A., & Wahyono. (2022). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 578–586.
- Alviona, A. V., & Saraswati, E. (2025). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Profitabilitas dan Tingkat Kepemilikan Pemerintah terhadap Carbon Emission Disclosure. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 82–87.
- Angelina, & Handoko, J. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 49–68. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.15834>
- Armono, D., Santosa, A. A., & Nurhayanto. (2024). Pengaruh Direktur Asing, Tingkat Pendidikan Komisaris, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 540–552. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art5>
- Astini, N. L. P. N. Y., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2022). Kinerja Lingkungan (Proper), Kinerja Keuangan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 134–146.

- Bhawono, A. (2022). *Warga Pari Gugat Holcim Atas Emisi Karbon*. Betahita.Id. <https://betahita.id/news/lipsus/7816/warga-pari-gugat-holcim-atas-emisi-karbon.html?v=1728440442>
- Budanti, N. P. L., Rustiarini, N. W., & Putra, I. G. C. (2024). Institutional Ownership, Board Diversity, And Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 9(2), 210–223. <https://doi.org/10.20473/jraba.v9i2.62591>
- Cahyaningsih, & Rahmadiyah, D. A. (2024). The Effect of Carbon Performance, Foreign Ownership, and Firm Size on Carbon Emission Disclosure. *AFRE Accounting and Financial Review*, 7(2), 156–165. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr>
- Caroline, S. T., Amarta, T. D., & Sari, N. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Di Perusahaan LQ45. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 11(1), 87–101.
- Choi, B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25. <https://doi.org/10.1108/01140581311318968>
- Dani, I. M., & Harto, P. (2022). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Green Investment Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.33508/jima.v12i2.5350>
- Diah, K., Lestari, R. P. I. P., & Sundari, S. (2025). Pengungkapan Emisi Karbon Yang Dipengaruhi Oleh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajemen, Dan Leverage Di Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1493–1502. <https://doi.org/10.25105/5bqmls89>
- Eryandi, V. U., Wahyudi, I., & Jumaili, S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, dan Profitabilitas Terhadap Sustainability Reporting Assurance. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1–17.
- Fatine, R., & Amanah, L. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(2), 1–19.
- Freman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.
- Ghachem, D. A., Basti, N., & Zureigat, Q. (2022). Ownership Structure and Carbon Emissions of SMEs: Evidence from OECD Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su142114408>
- Gunawan, F. M., & Lindrawati, L. (2024). Modal Intelektual, Aktivitas Internasional, dan Kepemilikan Asing pada Pelaporan Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 80–92. <https://doi.org/10.38043/jiab.v9i1.5604>
- Gunawan, O. F., & Aryati, T. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Kinerja Lingkungan, Dan Kepemilikan Manajerial Perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(4), 7643–7654. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9316>
- Izzania, M., Hardianingsih, A., Nurzanah, E., & Janiman. (2024). Carbon Emission Disclosure in Indonesia: Perspective of Stakeholder Theory. *Soedirman Accounting Review (SAR): Journal of Accounting and Business*, 09(01), 88–98. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2024.9.01.11827>
- Kim, E., Kim, S., & Lee, J. (2021). Do foreign investors affect carbon emission disclosure? Evidence from South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910097>
- Lasmianti, Pahala, I., & Khairunnisa, H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Bumn. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 586–612.

- Lina, L., & Rohmah, F. S. (2024). Ownership Structure, Board Size, and Carbon Emission Disclosures: Empirical Evidence from ASEAN-5 Countries. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 315–330. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.40399>
- Maulidiavitasari, J., & Yanthi, M. D. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Carbon Emission Disclosure Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntabilitas*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.11849>
- Mufarrihah, M. (n.d.). *Kesiapan Regulasi Indonesia untuk Memenuhi Komitmennya dalam COP21*. Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kesiapan-regulasi-indonesia-untuk-memenuhi-komitmennya-dalam-cop21/>
- Oyerogba, E. O., Olugbenro, S. K., Omojola, S. O., Wright, O., Aregbesola, O. D., Akinsola, T. O., & Amu, I. (2025). The Roles of Ownership Structure on Carbon Emission Disclosure Quality of the Listed Oil and Gas Companies in Nigeria. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 25–35. <https://doi.org/10.32479/ijeep.17230>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pub. L. No. 61 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41199/perpres-no-61-tahun-2011>
- Pistrikayanti, N. K., & Wiawati, N. G. P. (2024). Associations Between Government Ownership, Leverage, Media Exposure, Environmental Performance, and Carbon Emission. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(3), 708–721. <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i03.p09>
- Pramuditya, I. D. G. N. E. C., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). Dampak Mekanisme Good Corporate Governance pada Carbon Emission Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3052–3065.
- Putri, A. E., & Warnida. (2023). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 137–152. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i2.2273>
- Putri, N. A., Pamungkas, N., & Suryaningsum, S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Terhadap Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(2), 183–199. <https://doi.org/10.24167/jab.v20i2.4826>
- Rahmania, S. K. (2025). Pengaruh Sustainability Report Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan: Studi Literatur Review. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 869–873.
- Rizqullah, S. A. (2024). *Pengaruh Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia*.
- Saputra, I. P. B. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Negara Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Industri. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 123–127. <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun>
- Sekarini, L. A., & Setiadi, I. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Kompartement: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 203–212. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Selviana, & Ratmono, D. (2019). Pengaruh Kinerja Karbon, Karakteristik Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Setiany, E., Hidayah, N., Zamzami, A. H., & Ahmad, Z. (2022). Government Ownership, Media Exposure and Firm Characteristics on Carbon Emission Disclosure: The Case of Indonesia Manufacturing Industry. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(2), 193–203. <https://www.buscompress.com/index.html>
- Sukmawati, I., & Henny, D. (2024). Pengukuran Emisi Karbon Yang Dipengaruhi Oleh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajemen dan Leverage Dalam Suatu Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 825–834.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), Pub. L. No. 17 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40514>
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. 25 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Wandi, S. W. (2022). Perilaku Oportunistik Mekanisme Pengawasan dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 90–104.
- Widarjo, W., Sudaryono, E. A., Kurniawati, E. M., Putra, A. A., & Wibawa, B. A. (2024). Carbon Emission Disclosure By Non-Financial Companies In Indonesia: A Perspective Of Stakeholder Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 18–30.
- Winarni, S. I., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Free Cash Flow Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–22.
- WMO.com. (2025). *State of the Global Climate 2024 (WMO-No. 1368)*.
- Zahra, B. S. N., & Astuti, C. D. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kinerja Keuangan, dan Women on Board Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(2), 545–555. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.6683>